

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dari permasalahan penelitian ini digali dari berbagai literatur yang mengungkap berbagai teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sejalan dengan penelitian yang berjudul “Evaluasi Standar Pelayanan Pendidikan di Sekolah Unggulan (Studi Kasus di SMP Darul Hikam Bandung)”, maka tinjauan pustaka yang diperlukan dalam pembahasan judul diatas adalah: (a). Evaluasi Program, (b). Standar Pendidikan, (c). Pengelolaan Satuan Pendidikan.

Tinjauan pustaka dimaksudkan adalah memperoleh ketajaman dalam menganalisis masalah yang diteliti secara menyeluruh. Selain itu dimaksudkan juga untuk memberi kerangka acuan yang dijadikan titik tolak dan dukungan dalam mengkaji permasalahan serta memberikan wawasan berfikir ilmiah, sekaligus memberikan pemahaman tentang konsep-konsep yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kajian pustaka ini, peneliti dapat mempertajam pandangan dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti sehingga mempunyai dasar yang kuat.

A. Evaluasi Program

1. Konsep Evaluasi

Penyelenggaraan pendidikan bukan sesederhana mengadakan kegiatan biasa. Dampak dari pendidikan akan meliputi banyak orang dan menyangkut banyak aspek. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan harus dievaluasi agar

dapat dikaji kekurangannya dan kekurangan tersebut harus dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan pendidikan pada masa yang akan datang.

Evaluasi dilakukan untuk kepentingan pengambilan kebijaksanaan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* (bahasa Inggris). Dalam kamus *oxford advanced learner's dictionary of current English* (AS Horbny, 1986), evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung di dalam definisi tersebut pun menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggungjawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi menurut Suharsimi Arikunto (2004: 1) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dalam bidang pendidikan, evaluasi sebagaimana dikatakan Gronlund (1990: 5) merupakan proses yang sistematis tentang mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi untuk menentukan sejauhmana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Menurut Djemari Mardapi (2004: 19) evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok.

Pendapat lain dikemukakan Ralph Tyler (1950), evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan tercapai. Sementara Cronbach &

Stufflebeam menegemukakan bahwa evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan.

2. Tujuan Evaluasi

Mengevaluasi atau menilai memiliki tujuan yaitu:

a. *Penilaian berfungsi selektif*

Dengan cara mengadakan penilaian guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain:

- 1) Untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu.
- 2) Untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya.
- 3) Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa.
- 4) Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya.

b. *Penilaian berfungsi diagnostik*

Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat asilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu, diketahui pula sebab-musabab kelemahan itu. Jadi dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahuinya sebab-sebab kelemahan ini, akan lebih mudah dicari cara untuk mengatasi.

c. Penilaian berfungsi sebagai penempatan

Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat, adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lain. Sebagai alasan dari timbulnya sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Setiap siswa sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri-sendiri sehingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Akan tetapi disebabkan karena keterbatasan sarana dan tenaga, pendidikan yang bersifat individual kadang-kadang sukar yang harus berperan mengembangkan pribadi siswa melalui rincian aspek-aspek indikator tersebut sekaligus mengevaluasi, penulis berpendapat bahwa teori baru tersebut perlu juga diketahui dan dipelajari oleh para guru sehingga disajikan dalam buku ini.

Adapun rincian dari aspek-aspek atau indikator inteligensi dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan verbal (verbal linguistik),
- 2) Kemampuan mengamati dan rasa ruang,
- 3) Kemampuan gerak kinetis-fisik,
- 4) Kemampuan logika/matematika,
- 5) Kemampuan dalam hubungan intra-personal,
- 6) Kemampuan dalam hubungan inter-personal,
- 7) Kemampuan dalam musik/irama.

d. Penilaian berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan

Fungsi dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana suatu program berhasil diterapkan, karena keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana dan system administrasi.

3. Model-model Evaluasi

Model-model evaluasi menurut beberapa ahli, yaitu:

a. Goal oriented evaluation model (Tyler)

Model ini merupakan model yang muncul pertama kali. Yang menjadi objek pengamatan dalam model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, mengecek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Model ini dikembangkan oleh Tyler.

b. Goal free evaluation model (Michael Scriven)

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michael Scriven ini berlawanan dengan model yang pertama. Dalam model yang pertama evaluator secara terus-menerus memantau tujuan, yaitu sejak awal proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah dapat dicapai dalam model Goal free evaluation (evaluasi lepas dari tujuan) justru menoleh dari tujuan. Menurut Michael Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program tidak perlu melihat tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi

penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang sebetulnya tidak diharapkan).

Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan tetapi evaluator lupa memperhatikan seberapa jauh masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan akhir yang diharapkan oleh tujuan umum akibatnya jumlah penampilan ini tidak banyak manfaatnya.

Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program bukan secara rinci per komponen.

c. Formatif summative evaluation model (Michael Scriven)

Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah berakhir (disebut evaluasi sumatif).

Pada model ini, ketika melaksanakan evaluasi, evaluator tidak bisa melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Dalam model ini menunjukkan “apa, kapan dan tujuan” evaluasi dilaksanakan.

Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika ketika program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif adalah mengetahui sejauhmana program yang dirancang dapat berlangsung,

sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya hambatan-hambatan yang menyebabkan program tidak lancar, pengambilan keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program.

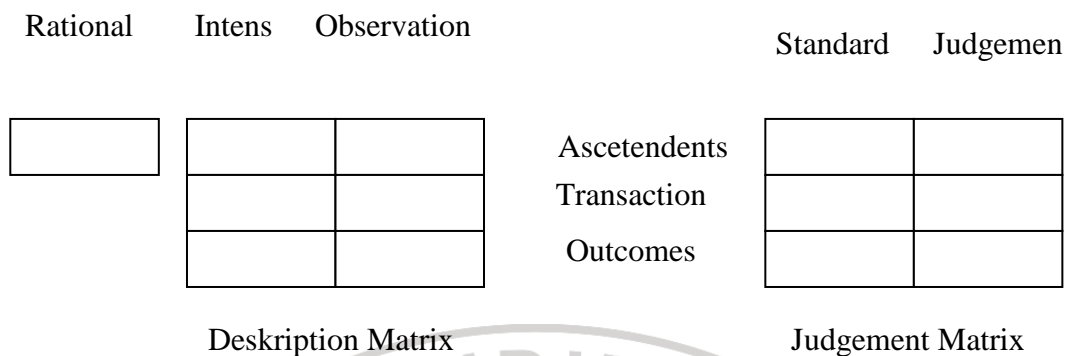
Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pendidikan dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Mengingat bahwa objek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dengan evaluasi sumatif maka lingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda.

d. Contenance evaluation model (Stake)

Model ini dikembangkan oleh Stake. Menurut ulasan yang tambahan yang diberikan oleh Fernandes (1984), model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu (1) deskripsi (description) dan (2) pertimbangan (judgments) serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program yaitu:

- 1) Anteseden (antesenden/context)
- 2) Transaksi (transaction/proces)
- 3) Keluaran (output/outcome).

Oleh Stake, model evaluasi yang diajukan dalam bentuk diagram, menggambarkan deskripsi dan tahapan sebagai berikut:



Gambar 2.1.

Evaluasi Model Stake

Tiga hal yang dituliskan di antara dua diagram, menunjukkan objek atau sasaran evaluasi. Dalam setiap program yang dievaluasi, evaluator harus mampu mengidentifikasi tiga hal, yaitu: (1) anteseden -yang diartikan sebagai konteks-, (2) transaksi -yang diartikan proses-, dan (3) outcome -yang diartikan sebagai hasil-. Selanjutnya, kedua matriks yang digambarkan sebagai deskripsi dan pertimbangan, menunjukkan langkah-langkah yang terjadi selama proses.

Matriks pertama, yaitu deskripsi berkaitan atau menyangkut dua hal yang menunjukkan posisi sesuatu (yang menjadi sasaran evaluasi), yaitu apa maksud/tujuan yang diharapkan oleh program, dan pengamatan/akibat, atau apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang betul-betul terjadi. Selanjutnya evaluator mengikuti matriks kedua, yang menunjukkan langkah pertimbangan, yang dalam langkah tersebut mengacu pada standar.

Menurut Stake, ketika evaluator tengah mempertimbangkan program pendidikan, mereka mau tidak mau harus melakukan dua perbandingan, yaitu:

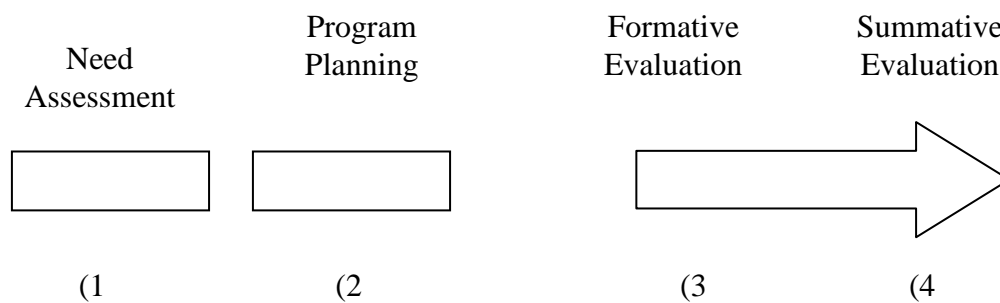
- a) Membandingkan kondisi hasil evaluasi pelaksanaan program tertentu dengan yang terjadi di program lain, dengan onjek sasaran yang sama.
- b) Membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai.

Bertitik tolak dari penjelasan Fernandes terhadap objek dan cara kerja model tersebut, penulis memberikan nama pada model yang dikemukakan oleh Stake tersebut dengan bahasa Indonesia, yaitu model *deskripsi-pertimbangan*.

e. CSE-UCLA evaluation model

CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSE dan UCLA. CSE merupakan singkatan dari *Center for Study of Evaluation*, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari *University of California in Los Angeles*. Ciri dari model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan dampak. Fernandes (1984) memberikan penjelasan tentang model CSE-UCLA menjadi empat tahap yaitu:

- 1) Needs assessment
- 2) Program planning
- 3) Formative evaluation
- 4) Summative evaluation



Gambar 2.2.

Tahapan-tahapan Model Evaluasi CSE-UCLA

Keterangan:

➤ CSE Model: Needs assessment

Dalam tahap ini evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Pertanyaan yang diajukan:

- a. Hal-hal apakah yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan keberadaan program?
- b. Kebutuhan apa yang terpenuhi sehubungan dengan adanya pelaksanaan program ini?
- c. Tujuan jangka panjang apakah yang dapat dicapai melalui program ini?

➤ CSE Model Program planning

Dalam tahap kedua dari CSE model ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap kesatu. Dalam tahap perencanaan ini program PBM dievaluasi secara cermat untuk mengetahui

apakah apakah rencana pembelajaran telah disusun berdasarkan hasil analisa kebutuhan. Evaluasi tahap ini lepas dari tujuan yang telah dirumuskan.

➤ CSE Model Formative evaluation

Dalam tahap ketiga ini evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program karena harus mengumpulkan data dan berbagai informasi dari pengembangan program.

➤ CSE Model Summative evaluation

Dalam tahap keempat, yaitu evaluasi sumatif, para evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif ini, diharapkan dapat diketahui tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, jika belum dicari bagian mana yang belum dan apa penyebabnya.

f. CIPP evaluation model (Stufflebeam)

Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk. (1967) di *Ohio State University*. CIPP merupakan sebuah singkatan yang terdiri dari empat buah kata, yaitu:

- 1) *Context evaluation*: evaluasi terhadap konteks
- 2) *Input evaluation*: evaluasi terhadap masukan
- 3) *Process evaluation*: evaluasi terhadap proses
- 4) *Product evaluation*: evaluasi terhadap hasil

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian, jika tim evaluator sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan maka mau tidak mau mereka harus menganalisa program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.

Model ini sekarang disempurnakan dengan satu komponen O, singkatan dari *outcome* sehingga menjadi model CIPPO.

Model CIPP hanya berhenti pada mengukur *output* (product), sedangkan CIPPO sampai pada implementasi dari *product*. Sebagai contoh, jika *product* berhenti pada lulusan, sedangkan *outcome* sampai pada bagaimana kiprah lulusan tersebut di masyarakat atau di pendidikan selanjutnya, atau untuk product pabrik, bukan hanya pada kualitas barang, tetapi pada kepuasan pemakai atau konsumen.

a) Evaluasi konteks

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang harus dilayani, dan tujuan proyek.

b) Evaluasi masukan

Tahap kedua dari model evaluasi CIPP adalah masukan. Maksud dari evaluasi masukan kemampuan awal dalam menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan.

c) Evaluasi proses

Evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” program akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

d) Evaluasi produk atau hasil

Evaluasi produk atau hasil diarahkan pada hal;-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Evaluasi produk merupakan tahap akhir dari serangkaian evaluasi program.

g. Discrepancy model (Provus)

Kata discrepancy adalah istilah bahasa Inggris, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi: “kesenjangan”. Model yang dikembangkan oleh Malcom Provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen.

Model ini menekankan pada kesenjangan yang sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara seharusnya dicapai dengan yang sudah riil dicapai.

4. Proses Evaluasi

Adapun tahapan daripada pelaksanaan evaluasi yaitu:

a. Perencanaan evaluasi

- ✓ Analisa kebutuhan
- ✓ Menyusun program evaluasi
- ✓ Penyusunan angket dan instrument pengambilan data

b. Pelaksanaan evaluasi

Pelaksanaan evaluasi dengan melakukan beberapa tahapan seperti:

- ✓ Pengambilan data dengan tes, observasi, angket, wawancara dan dengan metode analisa dokumen dan artifak.
- ✓ Analisa data
- ✓ Pengolahan data

c. Penyusunan kesimpulan dan rumusan rekomendasi.

d. Penyusunan laporan

B. Standar Pendidikan

1. Konsep Standar Pendidikan

● Pendidikan sebagai hak dan kebutuhan setiap individu masyarakat perlu direncanakan, diarahkan dan dibina dalam kerangka yang utuh sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dan mampu diberdayakan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berujung pada tujuan pembangunan nasional.

Persamaan persepsi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional perlu diarahkan pemerintah dengan tujuan meminimalisir perbedaan kesenjangan antar penyelenggara pendidikan yang akan berimbas pada kualitas peserta didik yang dihasilkan.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan diharapkan mampu memberikan arah dan koridor pelaksanaan bagi para penyelenggara pendidikan sehingga tujuan pendidikan nasional mampu diupayakan dengan dukungan seluruh jajaran pelaksana dan penyelenggara pendidikan.

Disamping itu, standar nasional bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan disusun secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan kehidupan lokal, nasional dan global.

Standar nasional pendidikan seperti yang tersurat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan yang secara langsung dapat menjadi penunjang terlaksananya manajemen pendidikan yang berkualitas sehingga dapat menciptakan generasi yang memiliki kualifikasi seperti apa yang diharapkan.

2. Ruang Lingkup Standar Pendidikan

Delapan standar tersebut merupakan kesatuan utuh yang saling berkaitan yang mampu menciptakan kualitas pendidikan secara maksimal

sehingga pengembangan potensi peserta didik diharapkan dapat berkembang dengan baik.

Cakupan standar pendidikan terdiri dari:

a. Standar Isi (Permendiknas No. 22/ 2006)

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang secara keseluruhan mencakup: kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi.

Standar isi dijabarkan melalui lebih spesifik kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Menurut Mulyasa, E (2008: 21) pengertian dari KTSP menyatakan bahwa:

“KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana,

sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat”.

Sedangkan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP 2006:

5) KTSP yaitu:

“Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus”.

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah:

- 1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;
- 2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama;
- 3) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. (Mulyasa, 2008: 22).

Sedangkan menurut Baedhowi (2007: 7-8) menyatakan bahwa tujuan dari KTSP yaitu:

“Tujuan KTSP adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan (karakteristik), kondisi, potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah, satuan pendidikan dan peserta didik dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional”.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada semua jenjang pendidikan dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah dengan berpedoman pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI)

serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (permendiknas, no 22 tahun 2006):

- 1) Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

- 2) Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

- 3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- 4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan dan memperhatikan pengembangan integritas pribadi, kecerdasan spiritual, keterampilan berpikir (*thinking skill*), kreatifitas sosial, kemampuan akademik, dan keterampilan vokasional.

- 5) Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian kurikulum dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

- 6) Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non formal, dan informal dengan

memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7) Seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan global, nasional, dan lokal untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan global, nasional, dan lokal harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan perkembangan era globalisasi dengan tetap berpegang pada motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menetapkan bahwa komponen-komponen KTSP terdiri dari sebagai berikut:

1) Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

2) Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut:

- a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
- b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- c) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d) Kelompok mata pelajaran estetika.
- e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 pasal 7. Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

3) Kalender Pendidikan

Kurikulum tingkat satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu pada dokumen standar isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah (E. Mulyasa 2006: 86).

4) Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

b. Standar Proses (Permendiknas No. 41/ 2007)

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, pada pendidikan umum dan pendidikan khusus, baik pada sistem paket maupun sistem kredit semester.

Standar proses pembelajaran merujuk pada KTSP yaitu proses pembelajaran yang berorientasi ada penggalan potensi peserta didik sehingga peserta didik mampu mengoptimalkan potensi yang ia miliki.

c. Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas No. 23/ 2006)

Kompetensi lulusan adalah tujuan dari proses pendidikan pada tiap jenjang yang dijadikan penilaian akhir bagi pelaksana pendidikan. Kompetensi lulusan hendaknya mampu menjabarkan proses pendidikan yang telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu sehingga tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik dapat tersirat dengan baik.

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan secara faktual saat ini yaitu dituangkan pemerintah dengan

menetapkan standar kompetensi lulusan dengan dilaksanakannya ujian akhir nasional (UAN) bagi semua tingkatan.

Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni:

- 1) Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
- 2) Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
- 3) Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permendiknas No. 24/2007)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai fasilitator proses pendidikan menjadi subjek pendidikan sehingga keberadaannya tak mampu dipandang sebelah mata. Pendidik hendaknya memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya selain dari kompetensi lain yang harus dimilikinya yaitu : pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara professional, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat. Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Penjabaran lebih jelas dituangkan dalam peraturan pemerintah sebagai berikut:

- 1) Permendiknas No. 16/ 2007 tentang guru
- 2) Permendiknas No. 13/ 2007 tentang kepala sekolah
- 3) Permendiknas No. 12/ 2007 tentang pengawas
- 4) Permendiknas No. 24/ 2008 tentang TU
- 5) Permendiknas No. 27/ 2008 tentang konselor
- 6) Permendiknas No. 25/ 2008 tentang tenaga perpustakaan
- 7) Permendiknas No. 26/ 2008 tentang laboratorium sekolah.

Guru merupakan ujung tombak dari proses pendidikan. Gurulah panutan utama bagi anak didik. Semua sikap dan perilaku guru akan dilihat,

didengar, dan ditiru oleh anak didik. Sikap dan perilaku anak didik berada dalam lingkaran tata tertib dan peraturan sekolah. Guru mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mendidik anak didik. Guru mempunyai hak otoritas untuk membimbing dan mengarahkan anak didik agar menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dimasa depan.

Guru juga harus menguasai teknik dan prosedur pelaksanaan tugasnya dalam hal ini mengajar dan membimbing siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Seorang guru dalam kaitannya dengan tugas pendidikan dan melayani siswa terutama dalam proses belajar mengajar mutlak harus memiliki penguasaan materi dan keterampilan teknis mengajar. Pelaksanaan pengajaran ini menduduki kedudukan sentral, sebab pada kegiatan ini terjadi titik temu antara pendidik dan terdidik. Dan kegiatan layanan belajar yang dilakukan oleh guru akan lebih banyak terjadi didalam kelas ketika PBM berlangsung dibandingkan dengan diluar sekolah.

Peran guru dalam kegiatan belajar mengajar menurut Meilani Rajmeiyanti (2003: 17-23), yaitu:

a) Guru sebagai pengajar

Guru dengan peranannya sebagai pengajar, dituntut untuk dapat menyampaikan dan memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis. Dalam hal ini guru berperan sebagai sumber belajar, sehingga konsekuensinya guru harus menguasai bahan atau materi yang akan diajarkan.

b) Guru sebagai pengelola kelas

Dalam perannya sebagai pengelola kelas (*learning manager*), guru dituntut untuk dapat mengelola kelas, mengelola lingkungan, membimbing pengalaman-pengalaman siswa sehari-hari kearah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya guru dituntut untuk mempergunakan teori perkembangan supaya memudahkan mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan pengelolaan kelas adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar serta mampu memperoleh hasil yang diharapkan.

c) Guru sebagai mediator dan fasilitator

Sebagai mediator, guru menjadi perantara dalam hubungan antar manusia. Dalam hal ini terdapat tiga kegiatan guru, yaitu mendorong berlangsungnya tingkah laku sosial yang baik, mengembangkan gaya interaksi pribadi, dan menumbuhkan hubungan yang positif antar siswa. Selain itu, guru sebagai mediator diisyaratkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang media pendidikan karena media merupakan alat komunikasi yang efektif.

Sebagai fasilitator, guru diharuskan mampu mengusahakan sumber belajar yang sekiranya berguna atau menunjang pencapaian tujuan PBM, baik berupa buku teks, narasumber, majalah, surat kabar, dan lain-lain.

d) Guru sebagai evaluator

Setiap kali PBM selesai dilaksanakan maka pada waktu itu pula diadakan evaluasi. Guru berperan sebagai evaluator dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran yang baru diberikan, sekaligus untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelas atau kelompoknya. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui keefektifan metode mengajar yang digunakan.

Partisipasi guru dalam pelayanan peserta didik sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab guru secara formal. Pelayanan peserta didik perlu penanganan secara serius, karena peserta didik adalah warga sekolah yang menjadi tujuan akhir sebagai “*output*” atau keluaran yang perlu dipertahankan kualitas lulusannya.

e. Standar Sarana dan Prasarana (Permendiknas No. 19/ 2005)

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi faktor lain yang mendukung pelaksanaan proses pendidikan. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

f. Standar Pengelolaan (Permendiknas No. 19/ 2007)

Pengelolaan pendidikan sebagai dasar pelaksanaan proses pendidikan hendaknya mengarah pada tujuan pendidikan nasional disamping memiliki

keunggulan lokal yang dikembangkan penyelenggara dan pelaksana pendidikan setempat. Pemerintah memberikan arah tersebut yang dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan sehingga dapat dilaksanakan konsensus pendidikan secara nasional.

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

g. Standar Pembiayaan (Permendiknas No. 48 Tahun 2008 dan Permendiknas No. 69/ 2009)

Pembiayaan pendidikan seringkali dijadikan bahan perbincangan tiada henti bagi masyarakat. Biaya pendidikan yang relatif mahal menjadi isu hangat dalam lingkungan pendidikan saat terlepas dari keterkaitan biaya dengan kualitas pendidikan yang ada. Biaya pendidikan cenderung dijadikan pergunjungan hebat dalam kehidupan yang kian sulit. Pemerintah memberikan arah dalam pembiayaan pendidikan sehingga diharapkan menjadi bahan kajian bagi penyelenggara pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan dalam menentukan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

h. Standar Penilaian Pendidikan (Permendiknas No. 20/ 2007)

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan proses pencapaian hasil belajar peserta didik.

Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan peserta didik selama proses pendidikan berlangsung sehingga menjadi dasar pengembangan bagi pendidik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Penilaian pendidikan dilakukan secara objektif, adil, terbuka, terpadu, sistematis berdasar pada kriteria yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini indikator penilaian terdiri dari 3 komponen yakni penilaian kognitif, penilaian afektif dan penilaian psikomotorik

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

C. Pengelolaan Satuan Pendidikan

1. Konsep Pengelolaan Satuan Pendidikan

a. Pengertian pengelolaan sekolah

Istilah pengelolaan merupakan pengertian dari istilah *manajemen* (inggris). Istilah ini berasal dari bahasa latin, perancis dan italia. Istilah itu sebagai berikut: *manus, mano, manage/ menege, meneggaire. Meneggaire* berarti melatih kuda agar kaki kuda dapat melangkah seperti dikehendaki pelatuhnya. (Ade Rukmana dan Yati S. Mulyati, 2003: 4). Manajemen sekolah

dapat diartikan sebagai suatu penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pembelajaran (Rohiat, 2008).

Manajemen pendidikan yang seringkali disebut sebagai manajemen sekolah sangat diperlukan untuk menjamin keseluruhan proses pendidikan dapat terlaksana dengan optimal. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Purwanto dan Djojopranoto (1981: 14) bahwa:

“Manajemen pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan, dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, materiil maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.”

Sementara, Engkoswara (1987: 42) mengemukakan pendapatnya mengenai manajemen pendidikan yaitu:

“Manajemen pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya yaitu sumber daya manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan menciptakan suasana yang baik bagi manusia, yang turut serta dalam pencapaian tujuan pendidikan yang disepakati. Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah suatu media belaka untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif yaitu efektif dan efisien.”

Jika diaplikasikan pada manajemen penyelenggaraan sekolah, maka pengertian manajemen adalah sebagai usaha pimpinan sekolah untuk memperoleh hasil dalam mencapai tujuan program sekolah melalui usaha orang lain, dengan proses dan prosedur, perangsang, pengorganisasian, pengarahan dan pembinaan pada pelaksanaan dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada.

b. Fungsi pengelolaan sekolah

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan dan perhitungan yang rasional. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kegiatan dengan perumusannya secara jelas dan tegas, agar tujuan program yang dimaksudkan dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Rumusan dari langkah-langkah tersebut disebut fungsi manajemen.

Pada hakikatnya upaya pengelolaan atau manajemen dilakukan untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan, baik tujuan nasional maupun tujuan institusional. Keberhasilan pencapaian tersebut akan tampak dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu secara maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola berbagai aspek komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang telah dirumuskan.

c. Prinsip-prinsip pengelolaan sekolah

Dalam pengelolaan sekolah bukanlah hal yang dapat dianggap mudah, tetapi di sana banyak yang akan dipertaruhkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sekolah perlu adanya suatu aturan atau prinsip yang harus dipegang oleh setiap pengelola sekolah.

Harl R. Douglass, (1963: 13-17) merumuskan tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan tujuan si atas kepentingan pribadi dan mekanisme kerja.

- 2) Mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab.
- 3) Memberi tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya.
- 4) Mengenal baik faktor-faktor psikologis manusia.
- 5) Relativitas nilai-nilai.

d. Garapan pengelolaan sekolah

Dalam melaksanakan kegiatannya, sekolah memiliki beberapa bidang garapan. Oleh karena itu diperlukan keteraturan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut kedalam bidang garapan yang sesuai. Adapun garapan manajemen sekolah meliputi:

1) Manajemen Kurikulum

Kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya.

Webster (1955) menyatakan bahwa kurikulum yakni sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi, yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat. Kurikulum juga berarti keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Sementara *B. Othanel Smith, W.O. Stanley, dan J. Harlan Shores* berpendapat, kurikulum merupakan sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat

diberikan kepada anak dan pemuda, agar mereka dapat berpikir dan berbuat sesuai dengan masyarakatnya.

Pendapat lain juga muncul dari *J. Lloyd Trump dan Delmas F. Miller (1973)* yang mengungkapkan bahwa:

“Kurikulum juga termasuk metode mengajar dan belajar, perubahan tenaga mengajar, bimbingan dan penyuluhan, supervise dan administrasi dan hal-hal struktural mengenai waktu, jumlah ruangan serta kemungkinan memilih mata pelajaran”.

Berbeda dengan beberapa ahli di atas, *Alice Miel (1946)* berpendapat,

“...kurikulum meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan dan sikap orang-orang melayani dan dilayani di sekolah, yakni anak didik, masyarakat, para pendidik dan personalia (termasuk penjaga sekolah, pegawai administrasi, dan orang lainnya yang ada hubungannya dengan murid-murid)”.

J. Galen Saylor dan William M. Alexander (1856) mengemukakan, kurikulum yaitu segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah atau di luar sekolah. Kurikulum juga meliputi apa yang disebut kegiatan ekstrakurikuler.

● Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum di sekolah merupakan penentu utama kegiatan sekolah. Demikian juga dengan siswa yang mulai masuk sekolah, mereka melakukan kegiatan belajar berdasarkan kurikulum yang berlaku dan selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang.

Kurikulum yang dirumuskan harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa, perkembangan siswa, tuntutan, dan kemajuan masyarakat.

Pemahaman dasar tentang konsep dasar manajemen kurikulum merupakan hal yang penting bagi para kepala sekolah yang kemudian merupakan modal untuk membuat keputusan dalam implementasi kurikulum yang akan dilakukan oleh guru. Manajemen kurikulum membicarakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada di sekolah sehingga kegiatan manajemen kurikulum ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

2) Manajemen Peserta Didik/Kesiswaan

Manajemen kesiswaan merupakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan masalah kesiswaan di sekolah. Tujuan manajemen kesiswaan adalah menata proses kesiswaan mulai dari perekrutan, mengikuti pembelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kegiatan manajemen kesiswaan meliputi: perencanaan murid baru, pembinaan siswa, dan kelulusan.

Dalam manajemen kesiswaan terdapat empat prinsip dasar, yaitu: (a) siswa harus diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka; (b) kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal; (c) siswa hanya termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa

yang diajarkan; dan (d) pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan ranah psikomotorik.

3) Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi: (1) perencanaan kebutuhan, (2) pengadaan, (3) penyimpanan, (4) penginventarisasian, (5) pemeliharaan, dan (6) penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.

4) Manajemen Sumber Daya Manusia

Terdapat empat prinsip dasar manajemen personalia yaitu: (a) dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga; (b) sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional; (c) kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh

terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah; dan (d) manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga sekolah dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk tujuan sekolah.

Disamping faktor ketersediaan sumber daya manusia, hal yang amat penting dalam manajemen personalia adalah berkenaan penguasaan kompetensi dari para personil di sekolah. Oleh karena itu, upaya pengembangan kompetensi dari setiap personil sekolah menjadi mutlak diperlukan.

5) Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara pengadministrasian dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan.

Tujuan manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik bersumber dari pemerintah maupun sumber-sumber lainnya.

6) Manajemen Hubungan masyarakat

Hubungan sekolah dan masyarakat dilakukan untuk menjembatani kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah dan masyarakat itu sendiri. Sekolah melakukan komunikasi dengan masyarakat agar memahami kebutuhan

pendidikan dan pembangunan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara sekolah, personil sekolah, dan anggota masyarakat.

7) Layanan Khusus

Manajemen layanan khusus dilakukan untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Keberhasilan proses belajar mengajar membutuhkan fasilitas lain untuk mencapainya. Keberhasilan belajar tersebut diantaranya harus ditunjang dengan pusat sumber belajar, pusat kesehatan sekolah, bimbingan konseling, dan kantin sekolah. Untuk menyelenggarakan layanan khusus tersebut dibutuhkan personil khusus pula. Namun, karena personil khusus ini tidak dapat diadakan, maka yang membantu pelayanan khusus ini adalah guru. Layanan khusus adalah usaha-usaha yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan atau ditangani oleh kepala sekolah maupun pakar pendidikan yang ahli dalam bidang tertentu kepada para siswa agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas.

2. Konsep Sekolah Unggulan

a. Pengertian sekolah unggulan

Sekolah unggulan adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (*output*) pendidikannya. (Depdikbud, 1994: 3). Selanjutnya menurut Nurkolis (1996: 12) bahwa “ Konsep sekolah unggulan

memfokuskan pada adanya peningkatan kinerja secara terus menerus dan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk menumbuhkembangkan prestasi siswa secara menyeluruh”. Berarti bukan hanya prestasi akademis saja yang ditumbuhkembangkan melainkan potensi psikis, fisik, etik, religi, emosi, spirit, adversity dan intelegensi. Sedangkan menurut Hasan (1996: 35) mengatakan bahwa: “Sekolah unggulan dapat diartikan sekolah yang mengolah suatu proses pendidikan yang mampu menghasilkan manusia-manusia unggul”.

Dewasa ini banyak dikembangkan sekolah unggulan dengan pengertian masukan (input), proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen yang unggul, layanan pendidikan, serta sarana prasarana dan fasilitas penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya visi sekolah

b. Latar belakang sekolah unggulan

Untuk menjamin hak peserta didik dalam memperoleh pelayanan pendidikan khususnya bagi yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab V Peserta Didik, ayat (1) bagian b, menjelaskan: “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya”.

Thomas Jefferson dalam Hawadi (1993: 84) melalui konsepnya *Diffusion of Education*, “Menekankan perlunya pemberian pelayanan

pendidikan yang berbeda sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh setiap orang. Memberikan pelayanan pendidikan yang berbeda tanpa melihat anak didik tergolong normal, cacat atau berbakat, dikenal sebagai prinsip demokrasi dalam pendidikan”. Perlunya perhatian khusus kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui sekolah-sekolah yang mengutamakan keunggulan adalah selaras dengan fungsi utama pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan optimal.

Perkembangan potensi tersebut memerlukan strategi yang sistematis dan terarah. Salah satu strategi yang ditempuh selama ini bersifat masal dengan cara memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memperhatikan perbedaan kecakapan, minat dan bakatnya. Strategi ini hanya pas dengan konteks pemerataan kesempatan, tetapi strategi tersebut kurang mampu menunjang usaha mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya manusia yang cepat. Dengan strategi tersebut, munculnya keunggulan secara acak dan sangat tergantung kepada motivasi belajar setiap peserta didik serta lingkungan belajar mengajarnya.

Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa sepertiga peserta didik yang dapat digolongkan sebagai siswa berbakat mengalami gejala “prestasi kurang” dan salah satu penyebabnya lingkungan belajar yang kurang menantang untuk dapat mewujudkan kemampuannya secara optimal. Padahal strategi masal akan mempunyai konsekuensi sumber daya (dana, tenaga dan sarana) yang berat. Untuk itu perlu dikembangkan strategi alternatif yang

bertujuan menghasilkan peserta didik yang unggulan, yaitu berupa pemberian perhatian dan perlakuan khusus kepada peserta didik dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Namun perlu disadari bahwa strategi tersebut tidak berarti peningkatan kualitas pendidikan untuk peserta didik secara masal diabaikan, karena pada hakikatnya pengembangan sekolah unggulan ini akan memberikan peluang bagi semua peserta didik untuk berprestasi secara optimal, justru strategi tersebut untuk mengimbangi kekurangan yang terdapat pada strategi konvensional

c. Karakteristik sekolah unggulan

Sekolah unggulan merupakan sekolah yang memiliki prestasi di atas rata-rata sekolah lain, memiliki dimensi-dimensi keunggulan sebagai ciri sekolah unggulan. Hal ini ditegaskan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1994: 3) sebagai berikut:

- 1) Masukan (input), yaitu siswa diseleksi secara ketat dengan menggunakan kriteria tertentu dan prosedur dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang dimaksud adalah: (1) Prestasi belajar superior dengan indikator angka raport, Nilai Ebtanas Murni (NEM), dan hasil tes akademik; (2) Skor psikotes yang meliputi intelegensi dan kreativitas; (3) Tes fisik, jika diperlukan;
- 2) Sarana dan prasarana yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler;

- 3) Lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan menjadi keunggulan yang nyata baik lingkungan fisik maupun sosial psikologi;
- 4) Guru dan tenaga kependidikan yang menangani harus unggul baik dari segi penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, maupun komitmen dalam melaksanakan tugas, untuk itu perlu disediakan insentif tambahan bagi guru berupa uang atau fasilitas lainnya seperti perumahan;
- 5) Kurikulumnya diperkaya dengan pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan serta motivasi belajar yang lebih tinggi disbanding dengan siswa seusianya;
- 6) Kurun waktu belajar lebih lama disbanding dengan sekolah lainnya. Karena perlu ada asrama untuk memaksimalkan pembinaan dan penampungan siswa dari berbagai lokasi. Di kompleks asrama perlu ada sarana yang bisa menyalurkan minat dan bakat siswa seperti perpustakaan, alat-alat olah raga, kesenian dan lain-lain yang diperlukan;
- 7) Proses belajar mengajar harus berkualitas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (accountable) baik kepada siswa, lembaga maupun masyarakat;
- 8) Sekolah unggulan tidak hanya memberikan manfaat kepada peserta didik di sekolah tersebut, tetapi harus memiliki resonansi social kepada lingkungan sekitarnya;

- 9) Nilai sekolah unggulan terletak pada perlakuan tambahan di luar kurikulum nasional melalui pengembangan kurikulum, program pengayaan dan perluasan, pengajaran remedial, pelayanan pembinaan dan konseling yang berkualitas, pembinaan kreativitas dan disiplin.

Djojonegoro (1998: 48) mengatakan bahwa “Sekolah unggulan adalah sekolah yang memiliki beberapa indikator. Yang dimaksud indikator tersebut sebagai berikut: (1) Prestasi akademik dan non akademik di atas rata-rata sekolah di daerahnya; (2) Sarana dan prasarana serta layanan yang lebih lengkap; (3) system pembelajaran lebih baik dan lebih panjang; (4) Melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap pendaftar; (5) Mendapatkan animo yang lebih besar dari masyarakat, yang dibuktikan dengan banyaknya jumlah pendaftar disbanding kapasitas kelas, dan (6) Biaya sekolah lebih tinggi dari sekolah di sekitarnya.

d. Filosofi sekolah unggulan

Sebagai lembaga pendidikan yang unggulan, sekolah ini memiliki filosofi yang berkaitan dengan: 1) Hakikat manusia, 2) Hakikat pembangunan nasional, 3) Tujuan pendidikan, dan 4) Usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut.

Pertama, hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa telah dilengkapi dengan berbagai potensi dan kemampuan. Potensi yang dimiliki pada dasarnya merupakan anugerah kepada manusia yang semestinya dimanfaatkan dan dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi tersebut agar menjadi aktual dalam kehidupannya, sehingga berguna bagi orang yang

bersangkutan, masyarakat dan bangsanya, serta menjadi bekal untuk menghambakan diri pada Tuhan adalah salah satu fungsi utama dari penyelenggaraan pendidikan dan lingkungan.

Kedua, hakikat dalam pembangunan nasional, manusia menjadi atau subjek dalam pembangunan. Untuk dapat memainkan peranan sebagai subjek, maka manusia Indonesia dikembangkan untuk menjadi manusia yang utuh, yang berkembang segenap dimensi potensinya secara wajar. Pendidikan nasional mengemban tugas dalam mengembangkan manusia yang utuh dan sekaligus merupakan sumber daya pembangunan.

Ketiga, tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 yaitu menghasilkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, produktif, sehat jasmani dan rohani, memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah dan bangsa dan sikap menghargai pahlawan, serta berorientasi masa depan.

Keempat, dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional perlu mengembangkan kemampuan peserta didik, pendidikan berpegangan kepada azas keseimbangan dan keselarasan, yaitu: keseimbangan antara kreativitas dan disiplin, keseimbangan antara persaingan dan kerjasaman, keseimbangan antara kemampuan berpikir holistic dengan kemampuan berpikir otomistik, dan keseimbangan antara tuntutan dan prakarsa.

e. Visi dan misi sekolah unggulan

Visi sekolah unggulan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang bermuara kepada tujuan pembangunan nasional memerlukan usaha-usaha yang sistematis, terarah, dan intensional dalam menggali dan mengembangkan potensi manusia Indonesia secara maksimal sehingga dapat menjadi bangsa yang maju, sejahtera, damai dengan dasar Pancasila, serta dihormati dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain dalam kompetensi global.

Berdasarkan visi sekolah unggulan tersebut, disusun sebuah misi dari sekolah unggulan yaitu meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia Indonesia sebagai subjek dan wahana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Visi dan misi sangat erat kaitannya dengan system nilai. Visi merupakan sari pati endapan dari system nilai. Visi dapat memacu motivasi serta sikap yang dapat menuntun perbuatan. Visi adalah kunci energy manusia, kunci atribut pemimpin dan pembuat kebijakan. Sedangkan nilai membentuk landasan yang kokoh bagi tujuan dan misi. Visi merupakan inti sekaligus sumber kekuatan organisasi. Sehingga visi memegang peran yang penting dalam keberhasilan tujuan organisasi.

Pada hakekatnya setiap kepala sekolah atau guru memiliki *personal vision*. Yang dimaksud *personal vision* adalah apa yang diinginkan oleh pendidik terhadap sekolah, apa yang menjadi misi utamanya, apa yang

menjadi landasan dan nilai-nilai intinya, serta cara pandang terhadap semua bagian yang terdapat dalam lembaga pendidikan.

Bath (1990: 47), menyebutkan arti pentingnya visi personal sebagai berikut: *“The personal vision of school practitioners is a kind of moral imagination that gives them the ability to see schools not as they are, but as they would like them to become”*. Artinya apabila seorang praktisi pendidikan memiliki visi personal, maka hal itu merupakan dambaan moral yang membuatnya mampu melihat sekolah seperti yang ia harapkan, dan bukan sebagaimana adanya.

Lebih lanjut Bath menjelaskan bahwa seorang kepala sekolah yang hendak mengembangkan visi personalnya, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: (a) *Do I have a personal vision?*; (b) *What are the essential elements of my personal vision?*; (c) *How can I sharpen and develop my vision and make it coherent, respectable, and legitimate for other and especially for my self?*; (d) *what would you happen if flew my vision from the flagpole in front of the school? What happens when I reveal and act on my vision?*; (e) *How nigt I reconcile my vision with the expectations and visions of the many other in my school?*.

Dengan mencoba memberikan jawaban yang detil terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, seorang kepala sekolah akan dapat mengembangkan visi pribadinya, sekaligus akan dapat diterima sebagai visi lembaga. Beberapa contoh rumusan ringkas visi sekolah yang dikembangkan,

antara lain: (a) *a community of learners*, (b) *risk taking*, (c) *respect to diversity*, (d) *a community of leaders*, dan (e) *low anxiety and high standards*.

f. Nilai-nilai pada sekolah unggulan

Beberapa pakar psikologi menyebutkan bahwa sekolah unggulan memiliki nilai-nilai yang dijadikan sebuah acuan atau landasan dalam segala perilaku seluruh warga sekolah yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Berkaitan dengan nilai-nilai pada sekolah unggulan, Razik dan Swanson (1993: 132) menyebutkan beberapa nilai yang dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan pendidikan antara lain meliputi: *equality*, *efficiency* dan *liberty* (Gutrhrie, Garms, and Pierce (1998)). Sedangkan Marshall, Mitchel and Wirt (1989) menyebutkan: *quality*, *equity*, *efficiency* and *choice* (*liberty of freedom*). Sementara Swanson (1989) mengemukakan lima macam nilai yang harus diangkat dalam pendidikan sebagai layanan masyarakat, yaitu: *liberty*, *equality*, *fraternity*, *efficiency*, and *economic growth*.

Sejalan dengan pendapat Razik dan Swanson, Caldwell and Spinks (1993: 73), menyebutkan lima macam nilai inti (*core values*) yang mesti dikembangkan pada sekolah unggulan (*excellence*). Tiga macam nilai: *quality*, *effectiveness* and *equity* merupakan tujuan (*ends/ terminal*), dan dua macam nilai: *efficiency* and *empowerment* merupakan sarana atau cara mencapai tujuan (*means/ instrumental*).

Miflen (1986) secara khusus mengidentifikasi nilai-nilai yang terkait pada persekolahan dan prestasi yang dicapainya. Pertama, prestasi dan persaingan. Prestasi dipandang sebagai nilai terminal (sebagai tujuan) dan

dapat pula dianggap sebagai nilai instrumental (sarana untuk mencapai tujuan). Prestasi sekolah tidak dapat dilepaskan dari persaingan atau kompetisi. Kompetisi merupakan nilai alamiah yang ada diantara siswa, guru, maupun antar sekolah. Kedua, kreativitas dan komformitas. Kreativitas siswa adalah sesuatu yang harus dikembangkan oleh guru secara positif. Meskipun pada tataran tertentu kreativitas seorang siswa dapat merepotkan guru. Demikian pula sebaliknya dengan komformitas, yang terkait dengan aturan, kedisiplinan, kepatuhan, ketergantungan dan sebagainya.

g. Tipe-tipe sekolah unggulan

Ada beberapa tipe sekolah unggulan, diantaranya yaitu:

1) Tipe 1

Tipe ini seperti yang diuraikan di atas, dimana sekolah menerima dan menyeleksi secara ketat siswa yang masuk dengan kriteria memiliki prestasi akademik yang tinggi.

2) Tipe 2

Sekolah dengan menawarkan fasilitas yang serba mewah, yang ditebus dengan SPP yang sangat tinggi.

3) Tipe 3

Sekolah unggul ini menekan pada iklim belajar yang positif di lingkungan sekolah. Menerima dan mampu memproses siswa yang masuk sekolah tersebut (input) dengan prestasi rendah menjadi lulusan (output) yang bermutu tinggi.